



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI**  
**UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 serta dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 48 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang membidangi pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
12. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di kabupaten.
13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
19. Petambak adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
20. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
21. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
23. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
25. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
26. Kepala Dinas adalah pejabat eselon II lingkup Dinas Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan dan perundangan.

**BAB II**  
**PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN**  
**PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

#### Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kecamatan dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan diketahui oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Realokasi antar kabupaten dalam wilayah propinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/ Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana pupuk subsidi dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### **BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana pupuk subsidi.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
  - c. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten.

## Pasal 9

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,-/kilogram
  - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,-/kilogram
  - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,-/kilogram
  - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,-/kilogram
  - e. Pupuk Organik = Rp 500,-/kilogram
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = 50 kilogram
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kilogram
  - c. Pupuk ZA = 50 kilogram
  - d. Pupuk NPK = 50 kilogram atau 20 kilogram
  - e. Pupuk Organik = 40 kilogram atau 20 kilogram

## Pasal 11

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang dalam Pengawasan

## **BAB IV** **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### Pasal 12

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal 2 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 Januari 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005





**I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT SUBSEKTOR**

(TON)

| No.          | Sub Sektor     | Urea         | SP-36      | ZA       | NPK        | Organik    |
|--------------|----------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 1            | TANAMAN PANGAN | 147          | 74         | 0        | 31         | 9          |
| 2            | HORTIKULTURA   | 4            | 2          | 0        | 3          | 4          |
| 3            | PERKEBUNAN     | 902          | 428        | 0        | 167        | 156        |
| 4            | PETERNAKAN     | 0            | 0          | 8        | 0          | 0          |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>1.053</b> | <b>504</b> | <b>8</b> | <b>201</b> | <b>169</b> |

**II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

(TON)

| No.          | Kecamatan         | Urea         | SP-36      | ZA       | NPK        | Organik    |
|--------------|-------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 1            | MANGGAR           | 35           | 15         | 0        | 6          | 13         |
| 2            | DENDANG           | 304          | 128        | 1,3      | 54         | 17         |
| 3            | DAMAR             | 15           | 3          | 0,1      | 7          | 0          |
| 4            | SIMPANG RENGGIANG | 183          | 125        | 1,0      | 23         | 60         |
| 5            | SIMPANG PESAK     | 133          | 71         | 3,9      | 30         | 29         |
| 6            | KELAPA KAMPIT     | 67           | 15         | 0,4      | 19         | 9          |
| 7            | GANTUNG           | 316          | 147        | 1,3      | 62         | 41         |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>1.053</b> | <b>504</b> | <b>8</b> | <b>201</b> | <b>169</b> |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
 Penata(III/c)  
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**I. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 TAHUN 2014**

(TON)

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan    | Jan | Feb       | Mar       | Apr       | Mei       | Jun       | Jul       | Agt       | Sep       | Okt        | Nov        | Des        |
|---------------|-------------------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1.            | MANGGAR           | 35           | -   | -         | 2         | 3         | 2         | 2         | 3         | 3         | 3         | 5          | 7          | 5          |
| 2.            | DENDANG           | 304          | -   | 5         | 5         | 5         | 10        | 10        | 20        | 20        | 30        | 50         | 90         | 59         |
| 3.            | DAMAR             | 15           | -   | -         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2          | 3          | 3          |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | 183          | -   | 5         | 9         | 9         | 8         | 8         | 10        | 20        | 25        | 35         | 49         | 5          |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | 133          | -   | 5         | 6         | 8         | 9         | 8         | 8         | 8         | 10        | 10         | 20         | 41         |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | 67           | -   | 2         | 3         | 5         | 4         | 3         | 4         | 6         | 6         | 6          | 10         | 18         |
| 7.            | GANTUNG           | 316          | -   | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 52         | 50         | 54         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>1.053</b> | -   | <b>37</b> | <b>46</b> | <b>51</b> | <b>54</b> | <b>52</b> | <b>66</b> | <b>78</b> | <b>95</b> | <b>160</b> | <b>229</b> | <b>185</b> |

**II. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 TAHUN 2014**

(TON)

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan  | Jan       | Feb       | Mar       | Apr       | Mei       | Jun       | Jul       | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.            | MANGGAR           | 15         | 5         | 4         | 4         | 2         | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -   |
| 2.            | DENDANG           | 128        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 8         | -   | -   | -   | -   | -   |
| 3.            | DAMAR             | 3          | 1         | 1         | 1         | -         | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -   |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | 125        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 15        | 10        | -   | -   | -   | -   | -   |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | 71         | 10        | 10        | 11        | 10        | 10        | 10        | 10        | -   | -   | -   | -   | -   |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | 15         | 5         | 5         | 5         | -         | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -   |
| 7.            | GANTUNG           | 147        | 20        | 30        | 30        | 20        | 20        | 15        | 12        | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>504</b> | <b>81</b> | <b>90</b> | <b>91</b> | <b>72</b> | <b>70</b> | <b>60</b> | <b>40</b> | -   | -   | -   | -   | -   |



**VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2014**

(TON)

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan  | Jan       | Feb       | Mar       | Apr       | Mei       | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.            | MANGGAR           | 13         | 2         | 3         | 3         | 3         | 2         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 2.            | DENDANG           | 17         | 4         | 5         | 4         | 4         | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 3.            | DAMAR             | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | 60         | 10        | 10        | 15        | 15        | 10        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | 29         | 10        | 10        | 9         | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | 9          | 3         | 3         | 3         | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 7.            | GANTUNG           | 41         | 10        | 11        | 10        | 10        | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>169</b> | <b>39</b> | <b>42</b> | <b>44</b> | <b>32</b> | <b>12</b> | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

**I. KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

(TON)

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan    | Pangan     | Hortikultura | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Total        |
|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 1.            | MANGGAR           | 35           | -          | -            | 35         | -          | -         | 35           |
| 2.            | DENDANG           | 304          | -          | -            | 304        | -          | -         | 304          |
| 3.            | DAMAR             | 15           | -          | -            | 15         | -          | -         | 15           |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | 183          | -          | -            | 183        | -          | -         | 183          |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | 133          | 3          | 0,1          | 130        | -          | -         | 133          |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | 67           | 1          | -            | 66         | -          | -         | 67           |
| 7.            | GANTUNG           | 316          | 143        | 3,9          | 169        | -          | -         | 316          |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>1.053</b> | <b>147</b> | <b>4</b>     | <b>902</b> | -          | -         | <b>1.053</b> |

**II. KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

(TON)

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan  | Pangan    | Hortikultura | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Total      |
|---------------|-------------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.            | MANGGAR           | 15         | -         | -            | 15         | -          | -         | 15         |
| 2.            | DENDANG           | 128        | -         | -            | 128        | -          | -         | 128        |
| 3.            | DAMAR             | 3          | -         | -            | 3          | -          | -         | 3          |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | 125        | -         | -            | 125        | -          | -         | 125        |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | 71         | 1,5       | 0,1          | 69         | -          | -         | 71         |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | 15         | 0,5       | -            | 15         | -          | -         | 15         |
| 7.            | GANTUNG           | 147        | 72        | 1,9          | 73         | -          | -         | 147        |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>504</b> | <b>74</b> | <b>2</b>     | <b>428</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>504</b> |

**III. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

**(TON)**

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan  | Pangan    | Hortikultura | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Total      |
|---------------|-------------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.            | MANGGAR           | 6          | -         | -            | 6          | -          | -         | 6          |
| 2.            | DENDANG           | 54         | -         | -            | 54         | -          | -         | 54         |
| 3.            | DAMAR             | 7          | -         | -            | 7          | -          | -         | 7          |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | 23         | -         | -            | 23         | -          | -         | 23         |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | 30         | 0,8       | 0,1          | 29         | -          | -         | 30         |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | 19         | 0,2       | -            | 19         | -          | -         | 19         |
| 7.            | GANTUNG           | 62         | 30        | 2,9          | 29         | -          | -         | 62         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>201</b> | <b>31</b> | <b>3</b>     | <b>167</b> | -          | -         | <b>201</b> |

**IV. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

**(TON)**

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan  | Pangan | Hortikultura | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Total      |
|---------------|-------------------|------------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.            | MANGGAR           | 0,0        | -      | -            | -          | -          | -         | -          |
| 2.            | DENDANG           | 1,3        | -      | -            | 1,3        | -          | -         | 1,3        |
| 3.            | DAMAR             | 0,1        | -      | -            | 0,1        | -          | -         | 0,1        |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | 1,0        | -      | -            | 1,0        | -          | -         | 1,0        |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | 3,9        | -      | -            | 3,9        | -          | -         | 3,9        |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | 0,4        | -      | -            | 0,4        | -          | -         | 0,4        |
| 7.            | GANTUNG           | 1,3        | -      | -            | 1,3        | -          | -         | 1,3        |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>8,0</b> | -      | -            | <b>8,0</b> | -          | -         | <b>8,0</b> |

**V. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

(TON)

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan  | Pangan   | Hortikultura | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Total      |
|---------------|-------------------|------------|----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.            | MANGGAR           | 13         | -        | -            | 13         | -          | -         | 13         |
| 2.            | DENDANG           | 17         | -        | -            | 17         | -          | -         | 17         |
| 3.            | DAMAR             | -          | -        | -            | -          | -          | -         | -          |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | 60         | -        | -            | 60         | -          | -         | 60         |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | 29         | 4        | -            | 25         | -          | -         | 29         |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | 9          | 2        | -            | 7          | -          | -         | 9          |
| 7.            | GANTUNG           | 41         | 3        | 4            | 34         | -          | -         | 41         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>169</b> | <b>9</b> | <b>4</b>     | <b>156</b> | -          | -         | <b>169</b> |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005







**Sub Sektor Perikanan****(TON)**

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.            | MANGGAR           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 2.            | DENDANG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 3.            | DAMAR             | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 7.            | GANTUNG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005





**Sub Sektor Perikanan****(TON)**

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.            | MANGGAR           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 2.            | DENDANG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 3.            | DAMAR             | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 7.            | GANTUNG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005







**Sub Sektor Perikanan****(TON)**

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.            | MANGGAR           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 2.            | DENDANG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 3.            | DAMAR             | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 7.            | GANTUNG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005





**Sub Sektor Perikanan****(TON)**

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.            | MANGGAR           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 2.            | DENDANG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 3.            | DAMAR             | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 7.            | GANTUNG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005





**Sub Sektor Perikanan****(TON)**

| No.           | Kecamatan         | Kebutuhan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.            | MANGGAR           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 2.            | DENDANG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 3.            | DAMAR             | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 4.            | SIMPANG RENGGIANG | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 5.            | SIMPANG PESAK     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 6.            | KELAPA KAMPIT     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 7.            | GANTUNG           | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005